

Laporan Keuangan Semester I 2025

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Brondong, 1 Juli 2025

Kepala PPN Brondong



Nur Alimin, S.St.Pt., M.Si
NIP. 198606102009011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	

C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Brondong, 1 Juli 2025

Kepala PPN Brondong

Nur Almir, S.St.Pi., M.Si

NIP. 198606102009011001



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I
LAMPIRAN	II
LAMPIRAN	III
LAMPIRAN	IV
LAMPIRAN	V

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,283,702,815 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,283,702,815 atau mencapai 63.97 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2,006,750,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp6,617,215,412 atau mencapai 43.94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15,058,405,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp215,880,645,588 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp132,214,642; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp215,748,430,946 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp472,882,103 dan Rp219,378,803,517

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,327,724,137 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7,888,767,247 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-6,561,043,110, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-33,531,373 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6,594,574,483.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp220,065,023,801, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-6,594,574,483 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 107,148,379 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 5,801,205,820 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp219,378,803,517

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	1,327,724,137	1,157,928,579
Jumlah Pendapatan		1,327,724,137	1,157,928,579
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	4,859,667,672	4,849,546,195
Beban Persediaan	D.4	25,448,000	40,188,000
Beban Barang dan Jasa	D.5	1,733,710,192	2,243,206,215
Beban Pemeliharaan	D.6	184,818,726	356,949,391
Beban Perjalanan Dinas	D.7	33,312,351	327,999,805
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	1,051,810,306	1,779,964,943
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.12	-	-
Jumlah Beban		7,888,767,247	9,597,854,549
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6,561,043,110)	(8,439,925,970)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(33,531,373)	5,748,517
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	429,983,409
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(33,531,373)	435,731,926
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(6,594,574,483)	(8,004,194,044)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNPB	D.15	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(6,594,574,483)	(8,004,194,044)

Brondong, 1 Juli 2025
Kepala RPN Brondong



Nur Alimin, S.St.Pi., M.Si
NIP. 198606102009011001

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024
- 4 Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024
- 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024
- 6 Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024
- 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025
- 8 Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024
- 9 Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024
- 10 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025
- 11 Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024
- 12 Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2025 dan 2024

- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dan 2024

- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 dan 2024

- 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2025 dan 2024
- 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024
- 17 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024

DAFTAR GRAFIK

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

URAIAN	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	2,006,750,000	1,283,702,815	63.97	1,086,093,869
JUMLAH PENDAPATAN		2,006,750,000	1,283,702,815	63.97	1,086,093,869
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	7,624,454,000	4,569,845,212	59.94	4,555,217,687
Belanja Barang	B.2.2	6,739,188,000	2,047,370,200	30.38	2,901,828,842
Belanja Modal	B.2.3	694,763,000	-	-	1,593,759,895
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		15,058,405,000	6,617,215,412	43.94	9,050,806,424


Brondong, 1 Juli 2025
Kepala PPN Brondong
 PERIKANAN LILISANTARA
 BRONDONG
Nur Alimin, S.St.P., M.Si
NIP. 198606102009011001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	220,065,023,801	219,420,697,171
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(6,594,574,483)	(8,004,194,044)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	107,148,379	(14,522,186)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	107,146,800	(14,615,359)
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	1,579	93,173
Jumlah		107,148,379	(14,522,186)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	5,801,205,820	7,964,712,555
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(686,220,284)	(54,003,675)
EKUITAS AKHIR	E.6	219,378,803,517	219,366,693,496

Brondong, 1 Juli 2025
Kepala PPN Brondong



Nur Alimin, S.St.Pj., M.Si
NIP. 198606102009011001

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	128,000,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	6,381,843
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	326,095,642	325,915,750
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(325,600,000)	(325,601,579)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	3,719,000	3,719,000
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		132,214,642	10,415,014
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	4,808,138,400	4,808,138,400
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	(837,098,368)	(786,550,926)
ASET TETAP			
Tanah	C.23	173,666,734,550	173,666,734,550
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	16,689,285,258	19,144,833,632
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	34,132,537,941	33,782,794,141
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	48,604,846,295	48,366,544,895
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	96,182,000	96,182,000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(57,441,155,098)	(58,850,256,528)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		215,748,430,946	216,206,832,690
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		215,880,645,588	216,217,247,704
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	289,506,710	122,654,824
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	55,375,393	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	51,156,553
Uang Muka dari KPPN	C.50	128,000,000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		472,882,103	173,811,377
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		472,882,103	173,811,377
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	219,378,803,517	220,065,023,801
JUMLAH EKUTAS		219,378,803,517	220,065,023,801
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		219,851,685,620	220,238,835,178

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,006,750,000	2,006,750,000
Jumlah Pendapatan	2,006,750,000	2,006,750,000
Belanja		
Belanja Pegawai	7,624,454,000	7,624,454,000
Belanja Barang	6,739,188,000	6,739,188,000
Belanja Modal	694,763,000	694,763,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	15,058,405,000	15,058,405,000

*Realisasi Pendapatan
Rp1,283,702,815*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,283,702,815 atau mencapai 63.97 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2,006,750,000. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,283,702,815. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun anggaran 2025 ada Kebijakan efisiensi anggaran sehingga adanya penurunan realisasi dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,006,750,000	1,283,702,815	63.97
Jumlah	2,006,750,000	1,283,702,815	63.97

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 18.19 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,283,702,815	1,086,093,869	18.19
Jumlah	1,283,702,815	1,086,093,869	18.19

*Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0*

B.1.1 Penerimaan Pajak

#VALUE!

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp1,283,702,815 dan Rp1,086,093,869. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 18.19 dari TA 2024 terdapat kenaikan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,283,702,815	1,086,093,869	18.19
Jumlah	1,283,702,815	1,086,093,869	18.19

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1,249,030	5,592,000	(77.66)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	156,517	(100.00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	294,413,244	2,121,090	13,780.28
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	246,881,645	420,291,639	(41.26)
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	741,158,896	639,949,214	15.82
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3,368,050	(100.00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	14,615,359	(100.00)
	-	-	-
Jumlah	1,283,702,815	1,086,093,869	18.19

B.2 Belanja

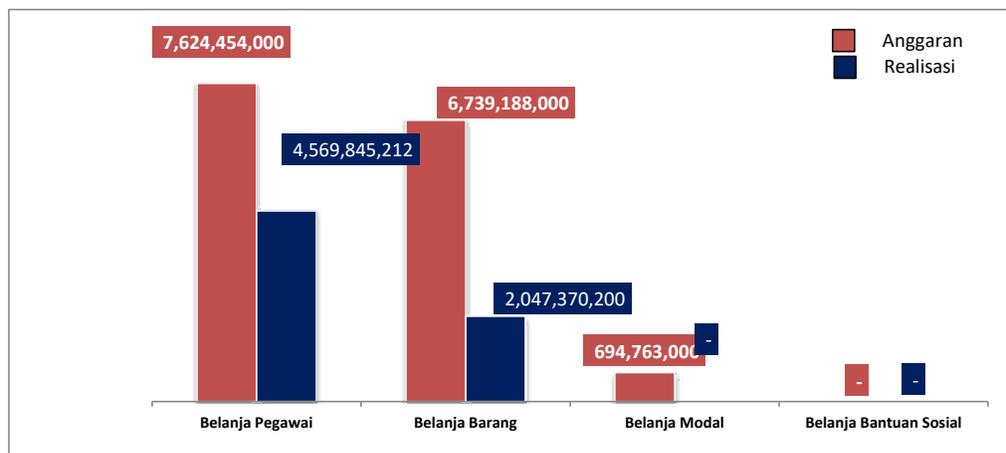
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp6,617,215,412 atau 43.94 % dari anggaran belanja sebesar Rp.15,058,405,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	7,624,454,000	4,569,845,212	59.94
Belanja Barang	6,739,188,000	2,047,370,200	30.38
Belanja Modal	694,763,000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	15,058,405,000	6,617,215,412	43.94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 26.89% Di tahun anggaran 2025 ada Kebijakan efisiensi anggaran sehingga adanya penurunan realisasi. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	4,569,845,212	4,555,217,687	0.32
Belanja Barang	2,047,370,200	2,901,828,842	(29.45)
Belanja Modal	-	1,593,759,895	(100.00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	6,617,215,412	9,050,806,424	(26.89)

Realisasi Belanja Pegawai
Rp4,569,845,212

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,569,845,212 dan Rp4,555,217,687. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0.32 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai PPPK di tahun 2024

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,310,315,260	1,377,745,500	(4.89)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,916	22,739	(21.21)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	116,464,038	122,598,050	(5.00)
Belanja Tunj. Struktural PNS	16,920,000	14,400,000	17.50
Belanja Tunj. Fungsional PNS	153,020,000	132,358,000	15.61
Belanja Tunj. PPh PNS	19,179,745	19,690,501	(2.59)
Belanja Tunj. Beras PNS	81,762,180	86,831,580	(5.84)
Belanja Uang Makan PNS	135,694,000	135,336,000	0.26
Belanja Tunjangan Umum PNS	18,525,000	25,925,000	(28.54)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	456,308,000	446,407,200	2.22
Beban Pembulatan Gaji PPPK	9,227	10,856	(15.01)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,004,610	24,538,400	22.28
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	4,573,515,340	4,556,319,362	0.38
Pengembalian Belanja Pegawai	3,670,128	1,101,675	233.14
Jumlah Belanja	4,569,845,212	4,555,217,687	0.32

Realisasi Belanja Barang
Rp2,047,370,200

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,047,370,200 dan Rp2,901,828,842. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 29.45% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh terdapat penurunan belanja barang karena adanya penghematan Anggaran T.A 2024

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	1,026,309,131	1,269,200,598	(19.14)
Belanja Barang Non Operasional	4,519,000	155,108,193	(97.09)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,249,500	39,448,000	(38.53)
Belanja Jasa	799,687,852	778,616,791	2.71
Belanja Pemeliharaan	161,023,866	352,527,728	(54.32)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31,580,851	306,927,532	(89.71)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2,047,370,200	2,901,828,842	(29.45)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2,047,370,200	2,901,828,842	(29.45)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
		-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1,593,759,895. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh terdapat kenaikan belanja modal peralatan dan mesin berupa : kendaraan fungsional kendaraan bermotor roda empat, kendaraan bermotor roda tiga, alat pengolah data, Pembangunan Mess Operator, Instalasi Air Bersih dan Jalan Komplek Pelabuhan.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	1,013,270,000	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	382,015,395	(100.00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	198,474,500	(100.00)
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1,593,759,895	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	1,593,759,895	(100.00)

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1,013,270,000, mengalami penurunan sebesar 100.00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh terdapat pengadaan peralatan dan mesin sebagai berikut : Kendaraan fungsional Kendaraan Bermotor Roda empat dan tiga, Lemari Besi/Metal, Alat Penghancur Kertas, Kursi Besi/Metal, A.C. Split, Televisi, P.C Unit, Lap Top, Tablet PC, dan Printer.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	1,013,270,000	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1,013,270,000	(100.00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	1,013,270,000	(100.00)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp382,015,395 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Terdapat rehab Bangunan gedung kantor dan gedung TPI.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	215,110,395	(100.00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	166,905,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	382,015,395	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	382,015,395	(100.00)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp198,474,500, mengalami penurunan sebesar 100.00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan terdapat pemasangan instalasi air bersih.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	44,448,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	44,448,000	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	44,448,000	(100.00)

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1,327,724,137

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1,327,724,137 dan Rp1,157,928,579. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 14.66. Hal tersebut disebabkan oleh Terdapat kenaikan pendapatan PNPB dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikannya di pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Rincian Pendapatan

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	294,413,244	2,498,310.00	11,684.50
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	288,969,224	520,966,431.00	(44.53)
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	744,341,669	634,463,838.00	17.32
Jumlah	1,327,724,137.00	1,157,928,579.00	14.66

Beban Pegawai
Rp4,859,667,672

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,859,667,672 dan Rp4,849,546,195.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0.21 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,473,488,360	1,544,546,600	(4.60)
Beban Pembulatan Gaji PNS	19,899	23,367	(14.84)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	130,840,678	137,778,810	(5.04)
Beban Tunj. Anak PNS	38,344,753	42,120,408	(8.96)

Beban Tunj. Struktural PNS	18,720,000	16,200,000	15.56
Beban Tunj. Fungsional PNS	168,630,000	148,668,000	13.43
Beban Tunj. PPh PNS	19,437,573	19,925,854	(2.45)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	4,859,667,672	4,849,546,195	0.21

Beban Persediaan
Rp25,448,000

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25,448,000 dan Rp40,188,000

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 36.68 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi dan persediaan bahan baku. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	25,448,000	40,188,000	(36.68)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	25,448,000.00	40,188,000	(36.68)

Beban Barang dan Jasa
Rp1,733,710,192

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,733,710,192 dan Rp2,243,206,215.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 22.71 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya penurunan beban barang dan jasa dikarenakan adanya kebijakan efisiensi belanja. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	996,225,164	1,375,055,449	(27.55)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	73,160	432,600	(83.09)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49,800,000	46,050,000	8.14
Beban Barang Operasional Lainnya	-	49,675,800	(100.00)
Beban Bahan	6,154,000	131,001,543	(95.30)
Beban Honor Output Kegiatan	-	6,100,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	19,006,650	(100.00)
Beban Langganan Listrik	373,711,543	451,068,791	(17.15)
Beban Langganan Telepon	223,275	361,300	(38.20)
Jumlah	1,733,710,192	2,243,206,215.00	(22.71)

Beban Pemeliharaan
Rp184,818,726

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp184,818,726 dan Rp356,949,391.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 48.22 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh penurunan beban pemeliharaan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi belanja. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54,154,000	107,427,720	(49.59)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107,856,920	184,818,077	(41.64)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Irigasi	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	22,807,806	64,703,594	(64.75)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	184,818,726	356,949,391	(48.22)

Beban Perjalanan Dinas
Rp33,312,351

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33,312,351 dan Rp327,999,805

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 89.84 persen disebabkan oleh penurunan belanja beban perjalanan dinas dikarenakan adanya kebijakan efisiensi belanja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	11,931,051	187,222,016	(93.63)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	5,250,000	(82.86)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	21,000,000	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,481,300	114,527,789	(82.12)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	33,312,351.00	327,999,805	(89.84)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1,051,810,306

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,051,810,306 dan Rp1,779,964,943.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	281,385,667	337,637,523	(16.66)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	371,048,911	358,560,484	3.48
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	33,973,500	724,475,000	(95.31)
Beban Penyusutan Irigasi	123,930,348	123,930,348	-
Beban Penyusutan Jaringan	190,924,438	184,814,146	3.31
Beban Penyusutan Properti Investasi	50,547,442	50,547,442	-
Jumah Penyusutan	1,051,810,306	1,779,964,943	(40.91)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1,051,810,306	1,779,964,943	(40.91)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-33,531,373

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-33,531,373 dan Rp5,748,517

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	156,517.00	(100)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1,249,030	5,592,000.00	(78)
Jumlah	(33,531,373.00)	5,748,517	(683)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp429,983,409.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3,368,050.00	(100.00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	412,000,000.00	(100.00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	14,615,359.00	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	429,983,409	(100.00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNBPN	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester I 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

0

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.220,065,023,801.00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.220,065,023,801.00 dan Rp.219,420,697,171.00

*Defisit LO
Rp.6,594,574,483.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.6,594,574,483.00 dan Rp.8,004,194,044.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.107,148,379 dan Rp.-14,522,186 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.107,146,800.00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.107,146,800.00 dan Rp.-14,615,359.00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	107,146,800
Jumlah	107,146,800.0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp1,579

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1,579 dan Rp.93,173. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	1,579
-	-
Jumlah	1,579.0

Transaksi Antar Entitas Rp5,801,205,820

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5,801,205,820 dan Rp.7,964,712,555. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,617,215,412
Diterima dari Entitas Lain	(1,283,702,815)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	467,693,223
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	5,801,205,820

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp 6,617,215,412, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1,283,702,815

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp467,693,223 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp219,378,803,517*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.219,378,803,517.00 dan Rp.219,366,693,496.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp128,000,000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.128,000,000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Piutang Bukan Pajak
Rp326,095,642

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp326,095,642 dan Rp325,915,750. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	326,095,642	325,915,750
	-	-
Jumlah	326,095,642	325,915,750

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp325,600,000

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp325,600,000 dan Rp325,601,579. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Semester I TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp3,719,000

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3,719,000 dan Rp3,719,000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	3,719,000	3,719,000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	3,719,000	3,719,000

Persediaan tersebut di atas dalam

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 30 Juni 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 Juni 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4,808,138,400 dan Rp4,808,138,400. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 30 Juni 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Semester I TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Properti Investasi	4,808,138,400	4,808,138,400
-	(837,098,368)	(786,550,926)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	3,971,040,032	4,021,587,474

Akumulasi Penyusutan
 Properti Investasi
 Rp837,098,368

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp-837,098,368 dan Rp-786,550,926. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah
 Rp173,666,734,550

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp173,666,734,550 dan Rp173,666,734,550. Nilai Tanah tersebut Terdapat koreksi Luasan dan perubahan kodifikasi yang semula kode : 20101040001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah menjadi koide : 2010103999 Tanah Bangunan Industri Lainnya dan tidak merubah nilai perolehan sesuai reviu Itjen R.591/ITJ.2/HP.380/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, surat terlampir.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	173,666,734,550
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2025	173,666,734,550

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester I TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp16,689,285,258

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp16,689,285,258 dan Rp19,144,833,632. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	19,144,833,632
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo per 30 Juni 2025	19,144,833,632
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(15,060,827,547)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	4,084,006,085

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a. terdapat pengadaan peralatan dan mesin sebagai berikut :
Kendaraan fungsional Kendaraan Bermotor Roda empat dan tiga, Lemari Besi/Metal, Alat Penghancur Kertas, Kursi Besi/Metal, A.C. Split, Televisi, P.C Unit, Lap Top, Tablet PC, dan Printer
- b. Transfer Masuk dari Biro Umum KKP
- c.
- d.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- adanya penghapusan peralatan dan mesin
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp34,132,537,941

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34,132,537,941 dan Rp33,782,794,141. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	33,782,794,141
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	132,280,000
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2025	33,915,074,141
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(6,851,828,353)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	27,063,245,788

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- terdapat Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP berupa pembangunan mess operator
- terdapat pengembangan nilai aset berupa rehab gedung kantor dan bangunan TPI
-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp48,604,846,295

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.48,604,846,295 dan Rp.48,366,544,895. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	48,366,544,895
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	48,366,544,895
Akumulasi Penyusutan s.d.	(35,528,499,198)
Nilai Buku per	12,838,045,697

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- terdapat pembelian berupa pengadaan Instalasi Air Bersih
- terdapat penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa pengadaan jalan kompleks pelabuhan

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-
-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp96,182,000

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.96,182,000 dan Rp.96,182,000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	96,182,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2025	96,182,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	96,182,000

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister
Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp57,441,155,098 dan Rp58,850,256,528. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16,689,285,258	(15,060,827,547)	1,628,457,711
2	Gedung dan Bangunan	34,132,537,941	(6,851,828,353)	27,280,709,588
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	48,604,846,295	(35,528,499,198)	13,076,347,097
4	Aset Tetap Lainnya	96,182,000	-	96,182,000
Akumulasi Penyusutan		99,522,851,494	(57,441,155,098)	42,081,696,396

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Semester I TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan

aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
	Jumlah	-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	-	-
-	-	-

	-	-	-
	-	-	-
Total		-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-
Mutasi Kurang	
-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp289,506,710

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp289,506,710 dan Rp122,654,824. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	122,654,824
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	122,654,824

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

terdapat langganan listrik, air, telepon dan internet bulan desember 2024 yang masih harus dibayar

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp55,375,393

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55,375,393 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :
dgsdfgdsghdfihdsdihfsihf

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :
hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-

Total	-	-
--------------	---	---

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

9afhasgdfgsdaifsgdhaf

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0*

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp51,156,553. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	-	51,156,553
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	51,156,553

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

*Uang Muka dari KPPN
Rp128,000,000*

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp128,000,000 dan

Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	128,000,000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	128,000,000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

jhhkjhgjcgjhgjghckj

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

tentang konsesii jasa

Ekuitas Rp219,378,803,517

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp219,378,803,517. dan Rp220,065,023,801. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1 Terdapat Aset Berupa Tanah yang Masih Bersengketa dengan Pihak Lain Berdasarkan data dari Tabel : Daftar Aset Tetap Tanah di PPN Brondong

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	LUAS TANAH (M2)
TANAH						
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	5	2000	20.636.550.000	17.624
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	2	2003	7.808.000.000	900
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	3	2004	3.965.775.000	1.103
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	4	2005	21.824.000.000	13.640
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	6	2007	2.852.800.000	1.783
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	7	2008	1.268.800.000	750
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	8	2008	1.430.809.550	894
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.01.01.04.001	9	2009	113.880.000.000	69.648
JUMLAH					173.666.734.550	

Dari 8 (delapan) NUP aset tanah yang dimiliki terdapat 1 (satu) bidang tanah di Brondong NUP 3 dengan luas tanah 1.103 m2 nilai buku Rp3.965.775.000,00 yang belum bersertifikat dan masih dalam sengketa dengan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) (Persero). Secara fisik aset tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh PPN Brondong, namun sesuai bukti sertifikat Nomor 08 tanggal 14 Juli 2009 tanah tersebut masuk ke dalam wilayah PT. DPS. Adapun kronologis aset tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanah seluas tanah 1.103 m2 merupakan bagian dari tanah hasil reklamasi Tahun 2004 yang dilakukan oleh PPN Brondong dengan kontrak Nomor: 423/SPP/PRONAS-04/VI/2004, tanggal 14 Juni 2004 senilai Rp1.718.747.000,00 dan telah diakomodir dalam Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/24/Kep/413.013/2011, tanggal 5 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Reklamasi kepada PPN Brondong yang berlokasi di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong seluas 16.000 m2 dengan peruntukan sebagai penambahan dermaga pelabuhan perikanan.
- b. PT. DPS memiliki tanah di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong dengan luas tanah 23.596
- c. Pada Tahun 2011, PT. DPS mengirimkan somasi kepada PPN Brondong melalui surat Nomor: 11/2709-10/DS/III/K-3, tanggal 26 Oktober 2011 perihal pemberitahuan dan somasi pembangunan
- d. Atas surat pemberitahuan dan somasi dari PT. DPS, PPN Brondong telah menjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, PT DPS melalui surat Nomor: 947/PPNBr/TU.210/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan ditembuskan kepada kantor BPN Kabupaten Lamongan yang berisi tidak dapat menghentikan pembangunan gardu listrik karena telah sesuai dengan wilayah kerja operasional pelabuhan.
- e. Berdasarkan tembusan surat dari Kepala PPN Brondong Nomor: 947/PPNBr/TU.210/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, BPN Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan surat undangan Nomor: 2425/UND/12.19/XI/2011, tanggal 14 November 2011 dengan agenda pemberian
- f. Pada tanggal 23 November 2011, berdasarkan undangan dari BPN Kabupaten Lamongan Nomor: 2425/UND/12.19/XI/2011, tanggal 14 November 2011, dilakukan pertemuan kedua belah pihak yang dimediasi oleh BPN Kabupaten Lamongan, namun dengan hasil tidak ada.
- g. Dikarenakan PPN Brondong masih meneruskan pembangunan gardu listrik, pada tanggal 23 Desember 2011, PT. DPS melakukan somasi kedua kepada PPN Brondong melalui surat Nomor: 11/3224-12/05/III/K-3, dalam surat tersebut PT. DPS menyampaikan bahwa posisi gardu listrik tersebut dinyatakan oleh BPN dalam sengketa, sehingga meminta PPN Brondong tidak melanjutkan pembangunan gardu listrik beserta instalasinya sampai dengan adanya keputusan dari BPN.
- h. Pada Tahun 2012, PT. DPS melalui surat Nomor: 12/0095-1/D5/III/K-3, tanggal 22 Januari 2012
- i. Dengan adanya surat somasi II dan III dari PT. DPS, maka dilakukan mediasi lanjutan dan pemeriksaan lapangan pada tanggal 30 Januari 2012 yang difasilitasi BPN Kabupaten Lamongan. Namun pihak PT. DPS tidak menghadiri acara tersebut, sehingga Perjanjian Penyelesaian Sengketa yang direncanakan untuk dibicarakan dan dimediasi oleh BPN Kabupaten Lamongan gagal dilakukan. Selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan oleh BPN Kabupaten Lamongan dan PPN Brondong dan PT. DPS yang diwakili oleh Satpam (tidak resmi), namun kunjungan lapangan tersebut juga tidak menghasilkan kesimpulan.

- j. Pada tanggal 27 Agustus 2018 Kepala PPN Brondong bersurat kepada Kepala BPN Kabupaten Lamongan perihal permintaan pengukuran tanah sengketa melalui surat Nomor: B.1060/PPNBr.A/TU.210/VIII/2018. Pada Tahun 2019, telah disampaikan hasil pengukuran tanah tersebut oleh BPN Kabupaten Lamongan melalui surat Nomor: 883/35.24/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019 bahwa berdasarkan kegiatan pemetaan hasil pengukuran tersebut di sebelah timur terindikasi overlap dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 08 an. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).
- k. Pada Tahun 2022, telah dilakukan audiensi antara KKP yang diwakili Biro Keuangan, Staf Keuangan dan PBMN Ditjen Perikanan Tangkap, Bagian Hukum Ditjen Perikanan Tangkap, dan PPN Brondong bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan di Kantor Bupati Lamongan tanggal 14 September 2022 dengan hasil Pemda Lamongan tidak berkeberatan untuk memulihkan fungsi sebagai Fasilitas Umum sesuai Perda Tata Ruang yang merupakan kewenangan Bupati Lamongan, dengan penyelesaian kedua belah pihak 5 menyerahkan seluruh aset di atas tanah dipersengketakan untuk dihibahkan ke Pemda Lamongan. Selanjutnya pihak Pemda Lamongan atas instruksi Bupati Lamongan akan memanggil PT. DPS untuk meminta klarifikasi. Namun, sampai dengan saat ini belum diketahui hasil klarifikasi dari Pemda Lamongan kepada PT. DPS.
- l. Terdapat Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pembahasan Usulan Daftar Normatif Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah TA. 2023 Secara Virtual tanggal 22 November 2022 yang dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya dengan maksud melakukan identifikasi bersama terkait status bidang tanah Belum Bersertipikat, blank (tanpa keterangan terkait pensertipikatannya), dan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) sebagaimana yang tersedia pada data Master Aset SIMAN per 24 Oktober 2022. Setelah mendapatkan Bimtek tersebut, PPN Brondong melakukan konsultasi ke KPKNL Surabaya berdasarkan SPT Nomor B.2155/PPNBR/KP.440/XI/2022 tanggal 24 November 2022 dengan hasil bahwa KPKNL menginstruksikan aset tanah dicatat sebagai kategori K3 akan dilakukan tindak lanjut dengan BPN Kab. Lamongan.